

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam mengimplementasikan pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai peranan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, menjaga dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dengan baik sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka diharapkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat.

Peningkatan jumlah PAD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah serta dapat memberi kontribusi yang besar terhadap belanja pemerintah. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiaya

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Bukan hanya sekedar memenuhi peran di APBN tetapi juga pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki merupakan peluang yang baik untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Setelah otonomi berjalan, munculnya persoalan PAD tidak sekedar berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi daerah sebagai unsur utama dalam penerimaan PAD. Dana PAD juga harus dikelola dengan baik oleh Pemda serta pemanfaatannya benar-benar untuk pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan masyarakat banyak, seperti untuk sektor pendidikan, pelayanan, kesehatan, infrastruktur fisik kota dan kabupaten, pembangunan atau pengembangan energi, penyediaan fasilitas air bersih, dan lain-lain.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Tabel 1.1. *Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Periode 2012-2016 (dalam ribuan rupiah)*

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	49,915	61,357	90,477	95,557	101,581
Belanja Daerah	639,607	741,073	774,365	884,146	940,116
Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah	7,80 %	8,28 %	11,68 %	10,81 %	10,80 %

(Sumber: BPS Kota Pematangsiantar tahun 2012-2016, data diolah.)

Berdasarkan Tabel 1.1, PAD terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, akan tetapi belum memberikan kontribusi yang cukup terhadap belanja daerah. Pada tahun 2012 rata-rata kontribusi PAD mengalami kenaikan dari 7,80% menjadi 8,28 % tahun 2013, begitu juga pada tahun 2014 menjadi 11,68 %. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 10,81 % begitu juga dengan tahun 2016 sebesar 10,80 %.

Tabel 1.2. *Penerimaan Sumber PAD Kota Pematangsiantar tahun 2012-2016 (dalam ribuan rupiah)*

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Daerah	19,169,514	27,274,948	29,216,495	31,105,131	35,735,129
Retribusi Daerah	20,595,630	21,556,193	11,965,498	5,801,757	7,696,960
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,770,463	7,006,291	5,301,474	7,310,842	12,218,771
Lain-lain PAD Yang Sah	3,379,759	5,520,531	43,994,031	51,340,135	45,930,463

(Sumber: BPS Kota Pematangsiantar tahun 2012-2016)

Dari Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan. Retribusi daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu Rp. 11.965.498.000 dan Rp. 5.801.757.000. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 5.301.474 dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yaitu Rp. 7.310.842.000. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu Rp. 45.930.463.000.

Tabel 1.3. *Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Periode 2012-2016 (dalam ribuan rupiah)*

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Dana Perimbangan	494,525	559,740	597,535	609,312	751,797
Belanja Daerah	639,607	741,073	774,365	884,146	940,116
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	77,32 %	75,53 %	74,84 %	68,91 %	79,96 %

(Sumber : BPS Kota Pematangsiantar tahun 2012-2016)

Dari Tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi dana perimbangan dari tahun 2013, 2014, dan 2015 mengalami penurunan masing-masing 75,53%, 74,84%, dan 68,91% apabila dilihat dari tahun 2012 yaitu 77,32 %. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat yaitu sebesar 79,96 %.

Berdasarkan Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 diatas, dapat disimpulkan pemerintah Kota Pematangsiantar belum mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal dan masih bergantung terhadap dana perimbangan untuk memenuhi belanja daerah karena kontribusi dana perimbangan lebih tinggi dibandingkan PAD di Kota Pematangsiantar yang mengakibatkan pembiayaan daerah masih bergantung kepada sumber dana dari pemerintah pusat.

Dengan diberikannya hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga wajib untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah, maka kebijakan pemerintah terhadap birokrasi, politik dan sosial budaya, serta ekonomi dalam hal ini kebijakan anggaran juga akan berbeda.

Dalam bidang ekonomi, sebelum dan sesudah otonomi daerah masih ada persamaannya yaitu masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan. Namun ketimpangan dalam ekonomi saat ini tidak tinggi dibandingkan dengan pada masa penjajahan. Dalam era reformasi juga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu naik dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Sehingga kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi pada kenyataannya tidak merata terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini akan mengacu kepada kebijakan anggaran pemerintah daerah bagaimana sebelum dan sesudah otonomi daerah sehingga dapat dilihat apakah ada pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Periode 2012-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan dalam penentuan adanya keterkaitan dengan permasalahan yang lainnya maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan daerahnya setelah diberlakukannya otonomi daerah.
2. Pemerintah Kota Pematangsiantar belum mampu memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti membatasi masalah pada: Laporan yang diteliti adalah Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebelum otonomi daerah tahun 1998-2002 dan sesudah otonomi daerah tahun 2012-2016 yang datanya diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi signifikan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2016 ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sesuatu tentu memiliki tujuan yang jelas sehingga penulis tersebut mengarah pada tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar periode 2012-2016.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kebijakan otonomi daerah pemerintah Kota Pematangsiantar sebelum otonomi daerah tahun 1998-2002 dan sesudah otonomi daerah tahun 2012-2016.
- b) Untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar sebelum otonomi daerah tahun 1998-2002 dan sesudah otonomi daerah tahun 2012-2016.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Pematangsiantar pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar periode 2012-2016.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah
Dapat menjadi acuan atau pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang tentang otonomi daerah dan PAD.
- b) Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar periode 2012-2016.